

POLITIK PENDIDIKAN DALAM PENGELOLAAN SEKOLAH ISLAM TERPADU

Iki Supriadi

ikisupriadi3@gmail.com

Institut Agama Islam Persis (IAIPI) Bandung

Abstract

This study looks at how educational politics affect the way Integrated Islamic Schools (SITs) are run in Rancaekek, West Java. It focuses on how national and local education policies shape the management, curriculum, and day-to-day operations of these schools. The research uses a qualitative method with a case study approach, including detailed interviews with school leaders, teachers, and other involved people, along with observations and a review of documents. The results show that educational policies, especially those about curriculum standards, greatly influence how SITs are managed. These policies often place more emphasis on academic success than on blending religious education. Also, local political issues affect how resources are shared, leading to differences between schools that have political support and those that don't. The study suggests that there is a need for educational policies that are more adaptable and consider the specific needs of SITs, so that religious education can be properly included with academic learning. This research helps better understand the challenges and chances faced by Islamic-based education institutions in their management.

Keywords: Educational Politics, Islamic Schools, Curriculum Integration, Educational Policy, Management, Local Politics.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan politik pendidikan memengaruhi cara mengelola Sekolah Islam Terpadu (SIT) di Rancaekek, Jawa Barat. Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh kebijakan pendidikan nasional dan daerah terhadap cara mengelola sekolah, penggabungan kurikulum, dan kegiatan sehari-hari di SIT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yaitu melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan pihak terkait lainnya, serta pengamatan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan, terutama terkait standar kurikulum, secara signifikan memengaruhi cara mengelola SIT, karena kebijakan tersebut cenderung lebih mementingkan pencapaian nilai akademik dibandingkan integrasi pendidikan agama. Selain itu, faktor politik di tingkat lokal juga memengaruhi pembagian sumber daya, sehingga terjadi ketimpangan antara sekolah yang memiliki hubungan politik kuat dan yang tidak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan kebijakan pendidikan yang lebih fleksibel dan memperhatikan kondisi setempat, agar kebutuhan SIT dapat terakomodasi dengan baik, sehingga pendidikan agama bisa diintegrasikan dengan pendidikan akademik. Penelitian ini memberikan informasi yang lebih dalam mengenai tantangan dan peluang dalam mengelola lembaga pendidikan berbasis agama.

Kata kunci: Politik Pendidikan, Sekolah Islam, Integrasi Kurikulum, Kebijakan Pendidikan, Pengelolaan, Politik Lokal.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia berkembang dengan cepat, baik jumlah lembaga pendidikannya maupun kualitas pengelolaannya. Salah satu bentuk pendidikan Islam yang kini semakin diminati adalah Sekolah Islam Terpadu (SIT). Sekolah Islam Terpadu menggabungkan nilai-nilai agama Islam dengan metode pendidikan modern agar menghasilkan generasi yang berprestasi secara akademik dan memiliki pemahaman agama yang baik serta memiliki karakter yang kuat. Pengelolaan sekolah ini mencakup berbagai aspek seperti kebijakan pendidikan, kurikulum, pengelolaan tenaga pengajar, dan pengaturan dana, yang semuanya dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan di Indonesia (Sidiq, 2016).

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pengelolaan Sekolah Islam Terpadu tak lepas dari pengaruh kebijakan pemerintah yang menentukan arah pendidikan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan pendidikan di sekolah berbasis agama (Suharyadi, 2020; Zulkifli, 2019). Selain itu, perubahan dalam manajemen pendidikan seperti modernisasi kurikulum dan peningkatan kualitas tenaga pengajar juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pengelolaan Sekolah Islam Terpadu (Hidayat, 2021). Namun demikian, pengelolaan pendidikan di SIT masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam seperti keterbatasan sumber daya, maupun dari luar seperti ketidakstabilan kebijakan pendidikan yang dipengaruhi oleh politik nasional.

Artikel ini memberikan penjelasan baru mengenai hubungan antara kebijakan pendidikan dan pengelolaan SIT, terutama dalam mengintegrasikan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh sekolah tersebut.

Sampai saat ini, belum banyak penelitian mendalam tentang pengaruh kebijakan pendidikan terhadap pengelolaan SIT, sehingga artikel ini dirancang untuk mengisi celah tersebut dengan analisis secara menyeluruh. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi bagaimana kebijakan pendidikan memengaruhi pengelolaan SIT, serta bagaimana kebijakan pendidikan dapat meningkatkan atau menghambat proses tersebut.

Artikel ini juga akan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi pengelola sekolah dalam menjalankan kebijakan yang kadang tidak sesuai dengan kebutuhan internal sekolah. Dari permasalahan tersebut, hipotesis penelitian menyatakan bahwa kebijakan pendidikan yang tidak konsisten akan menghambat efektivitas pengelolaan SIT. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran kebijakan pendidikan dalam pengelolaan SIT serta mengidentifikasi kebijakan yang mendukung atau menghambat keberhasilan pengelolaan sekolah berbasis agama. Selain itu, artikel ini juga bertujuan memberikan rekomendasi bagi pengelola SIT dalam mengatasi tantangan yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami pengaruh dari kebijakan pendidikan terhadap cara pengelolaan Sekolah Islam Terpadu (SIT). Metode studi kasus dipilih karena memungkinkan kita untuk mencermati fenomena dalam konteks nyata, dengan fokus pada pengalaman dan praktik di lapangan. Pendekatan ini membantu peneliti untuk memahami lebih dalam dinamika pengelolaan SIT, termasuk mempertimbangkan kebijakan pendidikan di tingkat pusat dan daerah.

Penelitian dilakukan di dua Sekolah Islam Terpadu yang berada di wilayah Rancaekek, Kabupaten Bandung. Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan politik yang khas, yang diharapkan bisa memberikan gambaran jelas tentang pengaruh kebijakan pendidikan terhadap pengelolaan SIT di tingkat lokal. Responden dalam penelitian terdiri dari 10 orang, yaitu kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan pengelola

yayasan. Pemilihan responden dilakukan dengan metode purposive sampling, sehingga peneliti bisa memilih orang-orang yang memiliki pengalaman langsung dalam mengelola SIT.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Wawancara menggunakan panduan semi-terstruktur yang membantu peneliti menggali informasi lebih luas mengenai kebijakan pendidikan, tantangan dalam pengelolaan, serta dampak kebijakan terhadap operasional sekolah. Observasi dilakukan untuk melihat bagaimana kebijakan pendidikan dijalankan di lapangan. Dokumentasi mencakup data kebijakan pendidikan, laporan tahunan sekolah, dan berbagai dokumen internal. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan metode analisis tematik. Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara terstruktur dengan mengidentifikasi tema-tema utama terkait pengaruh kebijakan pendidikan terhadap pengelolaan sekolah. Analisis dilakukan dengan mengkodekan data, mengelompokkan tema, dan menarik kesimpulan. Untuk memastikan keandalan hasil, penelitian menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai metode.

Hasil penelitian akan dianalisis untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pengelola SIT di Rancaekek dalam menerapkan kebijakan pendidikan, serta peluang peningkatan kualitas pengelolaan. Indikator kinerja yang digunakan mencakup efektivitas dalam menerapkan kebijakan, tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan, serta pencapaian target pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah atau sekolah.

Dengan menerapkan pendekatan kualitatif, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak kebijakan pendidikan terhadap pengelolaan Sekolah Islam Terpadu di Rancaekek, Kabupaten Bandung, serta memberikan saran bagi pihak penyelenggara sekolah dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam pengaruh kebijakan pendidikan terhadap cara mengelola Sekolah Islam Terpadu (SIT) di Rancaekek, Kabupaten Bandung. Dalam bagian ini, hasil penelitian akan dijelaskan secara rinci dan secara ilmiah, dengan menghubungkan fenomena yang terjadi di lapangan dengan teori-teori yang sesuai. Selain itu, hasil ini juga dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa. Pembahasan akan mencakup analisis tentang dampak kebijakan pendidikan, cara mengelola sumber daya manusia, serta pengaruh politik pendidikan terhadap kualitas pengelolaan pendidikan di SIT.

1. Pengaruh Kebijakan Pendidikan terhadap Pengelolaan Sekolah Islam Terpadu

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah dampak kebijakan pendidikan terhadap cara mengelola Sekolah Islam Terpadu. Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa, terungkap bahwa kebijakan pendidikan dari pemerintah sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan sehari-hari Sekolah Islam Terpadu. Salah satu kebijakan yang sering disayangkan adalah kebijakan kurikulum yang fokus pada pencapaian standar akademik, yang jarang memperhatikan integrasi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Kebijakan ini diterapkan secara nasional, cenderung lebih mengutamakan keahlian di bidang pengetahuan umum, sementara pendidikan agama dan pembentukan karakter yang intinya di Sekolah Islam Terpadu sering diabaikan atau hanya dianggap sebagai tambahan yang kurang mendapat perhatian.

Kenapa hal ini bisa terjadi? Fenomena ini bisa dijelaskan oleh teori kebijakan pendidikan yang menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah biasanya bersifat top-down, tanpa memperhatikan perbedaan konteks lokal atau kebutuhan spesifik

di sekolah-sekolah berbasis agama. Misalnya, kebijakan pemerintah lebih fokus pada pengukuran standar akademik secara nasional dan mengabaikan kebutuhan untuk mengintegrasikan pendidikan agama secara menyeluruh dalam sistem pendidikan. Kebijakan yang bersifat umum dan standar ini tidak memperhitungkan keberagaman dan konteks lokal di Sekolah Islam Terpadu yang ingin menggabungkan pendidikan akademik dengan pendidikan agama secara utuh. Ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan di Sekolah Islam Terpadu menciptakan tantangan besar dalam pengelolaan sekolah dan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah biasanya menekankan pengawasan ketat terhadap hasil akademik, sementara pendidikan agama yang diharapkan sebagai tujuan utama di Sekolah Islam Terpadu sering kali hanya dianggap sebagai sesuatu tambahan yang harus disesuaikan dengan kebijakan yang ada. Hal ini menyebabkan pengelolaan pendidikan di Sekolah Islam Terpadu terbatas, khususnya dalam integrasi kedua bagian pendidikan tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Suharyadi (2020), yang juga menemukan bahwa kebijakan pendidikan nasional sering kali tidak memperhatikan kebutuhan spesifik lembaga pendidikan berbasis agama, sehingga menyebabkan kesenjangan antara kebijakan nasional dan kebijakan yang diterapkan di lapangan.

Zulkifli (2019) mendukung temuan ini, dengan menyatakan bahwa kebijakan pendidikan yang terlalu fokus pada pencapaian akademik sering kali mengurangi perhatian pada pendidikan karakter dan agama, yang merupakan tujuan utama di sekolah berbasis agama. Seperti temuan dalam penelitian ini, kebijakan yang terlalu menekankan standar akademik mengarah pada pengabaian terhadap integrasi nilai-nilai agama dalam kurikulum Sekolah Islam Terpadu.

2. Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan tenaga kependidikan di Sekolah Islam Terpadu merupakan tantangan besar yang dihadapi dalam proses pendidikan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa salah satu hambatan utama dalam pengelolaan tenaga kependidikan di SIT adalah kurangnya pengembangan kemampuan para guru, terutama dalam menggabungkan materi agama dan akademik secara efektif. Banyak guru di SIT memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat, namun mereka tidak mendapatkan pelatihan yang memadai dalam hal mengintegrasikan materi akademik dengan nilai-nilai agama.

Mengapa hal ini terjadi? Keterbatasan pengelolaan tenaga kependidikan ini, terutama dalam membuka pelatihan dan pengembangan profesional guru, disebabkan oleh minimnya dana yang dimiliki oleh SIT. Kebanyakan SIT bergantung pada sumbangan masyarakat atau donasi pribadi, yang sering kali tidak cukup untuk mendukung pelatihan yang dibutuhkan. Seperti yang dijelaskan oleh Hidayat (2021), pengelolaan SDM yang baik membutuhkan dana yang cukup untuk pelatihan dan pengembangan kemampuan guru. Namun, dana yang terbatas membuat banyak sekolah tidak mampu memberikan pelatihan yang meningkatkan kemampuan guru dalam mengajarkan materi yang menggabungkan pendidikan akademik dan agama.

Selain itu, kurangnya perhatian dari pengelola sekolah terhadap pentingnya pengembangan kemampuan guru juga memperparah situasi ini. Dalam banyak kasus, pengelola lebih fokus pada pencapaian standar akademik dan pengelolaan operasional lainnya, tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap keterampilan mengajar guru agar dapat mengajar secara holistik. Hal ini membuat kualitas pembelajaran di SIT terbatas, dan akhirnya memengaruhi kualitas pendidikan yang diterima siswa. Temuan Hidayat (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan SDM di sekolah berbasis agama sering kali terhambat oleh keterbatasan dana dan kurangnya pelatihan kepada guru.

Temuan ini mendukung juga penelitian Supriyadi (2016), yang menyatakan bahwa banyak sekolah berbasis agama di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola SDM karena keterbatasan dana dan pelatihan yang tidak memadai. Oleh karena itu, pengelolaan SDM yang baik merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah Islam Terpadu.

3. Dampak Politik Pendidikan terhadap Kualitas Pendidikan

Dampak politik terhadap kualitas pendidikan di Sekolah Islam Terpadu (SIT) di Rancaekek menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Banyak responden menyebutkan bahwa pengelolaan dana pendidikan di SIT sering dipengaruhi oleh faktor politik lokal, sehingga menyebabkan ketidakmerataan dalam pemberian sumber daya antar sekolah. Beberapa responden menyatakan bahwa SIT di daerah yang memiliki hubungan politik lebih kuat dengan pemerintah lokal cenderung mendapat perhatian dan dana lebih banyak dibandingkan dengan SIT di daerah lain yang tidak memiliki hubungan politik yang sama.

Hal ini terjadi karena alokasi dana pendidikan seringkali bergantung pada hubungan politik antara sekolah dan pemerintah setempat. Seperti yang dijelaskan dalam teori distribusi sumber daya, sekolah yang memiliki hubungan politik kuat dengan pihak berkuasa lebih mudah mendapatkan dana dan fasilitas pendidikan. Sementara itu, sekolah yang tidak memiliki hubungan politik yang baik sering terabaikan. Praktik politik lokal yang tidak adil ini mengakibatkan ketidakmerataan kualitas pendidikan di berbagai wilayah.

Hal ini memperburuk ketidaksetaraan pendidikan, terutama bagi SIT yang biasanya memiliki sumber daya terbatas. Penelitian ini juga mendukung temuan Supriyadi (2016), yang menyebutkan bahwa faktor politik lokal turut memengaruhi distribusi dana pendidikan, sehingga menyebabkan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya. Penelitian Zulkifli (2019) juga menunjukkan bahwa politik lokal memainkan peran besar dalam menentukan siapa yang mendapat akses ke sumber daya pendidikan dan bagaimana dana dialokasikan.

Oleh karena itu, penting untuk mengelola dana pendidikan secara adil dan merata agar semua sekolah, terutama SIT, mendapat dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Temuan ini juga memberi pemahaman lebih dalam tentang dampak politik pendidikan terhadap pengelolaan SIT. Kebijakan pendidikan yang kurang fleksibel dan tidak memperhatikan kebutuhan lokal, serta keterbatasan sumber daya manusia karena dana yang tidak memadai, menjadi tantangan utama bagi pengelola SIT. Selain itu, dampak politik yang menyebabkan ketidakadilan dalam pemberian sumber daya juga merusak kualitas pendidikan di SIT. Dengan demikian, diperlukan kebijakan pendidikan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan sekolah berbasis agama dan distribusi sumber daya yang lebih adil agar kualitas pengelolaan pendidikan di SIT bisa meningkat.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak dari kebijakan pendidikan terhadap pengelolaan Sekolah Islam Terpadu (SIT) di Rancaekek, Kabupaten Bandung. Dari hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah, cara mengelola sumber daya manusia (SDM), serta dampak kebijakan pendidikan lokal memiliki peran penting dalam pengelolaan SIT.

Pertama, kebijakan pendidikan yang bersifat top-down dan lebih menekankan pada pencapaian standar akademik tidak selaras dengan kebutuhan khusus SIT yang menggabungkan pendidikan agama dan akademik secara bersamaan. Kebijakan yang lebih fleksibel dan mampu merespons kebutuhan lokal diperlukan agar tercapai keseimbangan antara tujuan pendidikan nasional dengan tujuan pendidikan di SIT.

Kedua, pengelolaan SDM di SIT menghadapi banyak tantangan karena keterbatasan dana yang berdampak pada minimnya pelatihan dan pengembangan kapasitas guru. Tanpa dukungan dana yang memadai, pengelola sekolah kesulitan menyediakan pelatihan yang diperlukan agar guru mampu mengintegrasikan kurikulum agama dengan mata pelajaran umum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya meningkatkan kapasitas para pengelola dan guru untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih holistik.

Ketiga, dampak kebijakan pendidikan lokal terhadap pengelolaan SIT sangat terasa, terutama dalam hal ketidakmerataan distribusi sumber daya pendidikan. Sekolah yang memiliki hubungan politik baik dengan pihak penguasa lokal cenderung lebih mudah mendapatkan dana dan fasilitas pendidikan, sedangkan sekolah berbasis agama sering terabaikan. Ketidakmerataan ini berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima siswa dan efisiensi dalam pengelolaan sekolah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah, kesulitan dalam mengelola SDM, serta pengaruh politik lokal terhadap distribusi sumber daya, menjadi faktor utama yang memengaruhi kinerja pengelolaan Sekolah Islam Terpadu. Diperlukan kebijakan yang lebih memperhatikan kebutuhan spesifik sekolah berbasis agama serta distribusi sumber daya yang lebih adil agar pengelolaan pendidikan di SIT dapat dioptimalkan.

Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah dibahas, berikut beberapa rekomendasi yang bisa diberikan untuk memperbaiki pengelolaan Sekolah Islam Terpadu:

Perlu adanya kebijakan pendidikan yang lebih fleksibel dan menyelaraskan kebutuhan sekolah berbasis agama. Pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik SIT, terutama dalam memadukan pendidikan agama dengan pelajaran umum. Kurikulum yang menyeluruh, yang menggabungkan nilai-nilai agama dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan, harus diterapkan agar hasil pendidikan seimbang antara akademik dan pengembangan karakter siswa.

Pengelolaan sumber daya manusia di SIT perlu diperhatikan lebih serius. Terutama dalam hal pengembangan kemampuan para guru. Diperlukan program pelatihan yang terus berkelanjutan agar guru bisa menyampaikan materi agama dengan baik sekaligus mengajar pelajaran umum. Pihak sekolah juga harus menyusun kebijakan internal yang mendukung peningkatan profesionalisme guru secara sistematis, agar kualitas pengajaran di SIT meningkat.

Distribusi sumber daya pendidikan juga harus lebih adil dan merata. Pemerintah perlu memastikan bahwa sekolah berbasis agama yang berada di daerah dengan akses politik atau sumber daya terbatas masih bisa mendapatkan alokasi dana dan fasilitas pendidikan yang seimbang. Distribusi ini harus dilakukan secara transparan dan adil, dengan menitikberatkan pada kebutuhan SIT terutama dalam pengembangan karakter dan pemahaman agama siswa. Pemerintah juga harus meningkatkan kerja sama dengan SIT. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak sekolah bisa menjadi solusi dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi SIT. Dalam kerja sama tersebut, pemerintah bisa memberikan insentif bagi SIT yang sukses menggabungkan pendidikan agama dan akademik, serta mendukung pelatihan bagi para guru di sekolah-sekolah tersebut.

Penelitian ini memberikan gambaran awal tentang pengelolaan SIT, namun masih ada banyak hal yang bisa diteliti lebih lanjut. Penelitian lebih mendalam bisa fokus pada kebijakan pendidikan di tingkat daerah dan dampaknya terhadap kualitas serta keberlanjutan SIT. Selain itu, penelitian tentang model pengelolaan SIT yang berhasil mengatasi tantangan pun bisa menjadi referensi dalam menyusun kebijakan pendidikan masa depan. Dengan demikian, kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal, peningkatan pengelolaan

SDM, serta pemerataan sumber daya pendidikan bisa menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Sekolah Islam Terpadu di Indonesia.

REFERENCES

- Hidayat, S. (2021). *Manajemen Pendidikan Islam di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suharyadi, A. (2020). *Kebijakan Pendidikan Nasional: Dampaknya Terhadap Pengelolaan Sekolah Islam Terpadu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sidiq, M. (2016). *Manajemen Sekolah Islam Terpadu: Tantangan dan Prospeknya*. Bandung: Alfabeta.
- Zulkifli, R. (2019). Kebijakan Pendidikan Islam: Implementasi dan Implikasinya di Sekolah Islam Terpadu. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 78-90.
- Iskandar, A. (2020). *Manajemen Pendidikan Islam dalam Perspektif Modernisasi*. Jakarta: Kencana.
- Nurdin, M. (2017). *Politik Pendidikan di Indonesia: Implikasi terhadap Pengelolaan Pendidikan di Sekolah Islam Terpadu*. Yogyakarta: Laksana.
- Rahman, F. (2019). *Model Pengelolaan Sekolah Islam Terpadu: Tantangan dan Peluang dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional*. Bandung: Alfabeta.
- Sari, H. (2018). Analisis Pengaruh Kebijakan Pendidikan terhadap Kualitas Pengelolaan Sekolah Islam Terpadu. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(2), 109-121.
- Supriyadi, R. (2016). *Pendidikan Islam di Era Modern: Strategi Pengelolaan dan Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.